

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN  
LAHAN PARKIR YANG TELAH DISEWAKAN**

**(Studi di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo  
Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Pada Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**REZA AYU APRILIA  
NPM : 1621030197**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN  
LAHAN PARKIR YANG TELAH DISEWAKAN**

**(Studi di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo  
Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Pada Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**REZA AYU APRILIA**

**NPM : 1621030197**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni. M.Hum.**

**Pembimbing II : Sucipto S.Ag. M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan penukaran suatu manfaat dengan jalan memberikan imbalan atas jasa dalam jumlah tertentu, pada dasarnya sewa menyewa yaitu pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Seperti halnya sewa menyewa lahan parkir beserta ruko yang ada di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Sewa menyewa lahan parkir beserta ruko yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan ? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif merupakan metode analisa data yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan teori. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan mengenai fenomena yang diselidiki. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad sewa menyewa yang terjadi di pasar Sidomulyo merupakan akad yang dilakukan secara lisan, dan suka sama suka. Dengan demikian rukun dan syarat akad sewa menyewa telah terpenuhi. Namun dalam praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan belum sesuai dengan Hukum Islam, sebab dalam melakukan akad sewa-menyewa yang dijadikan objek sewa akad diberikan sepenuhnya terhadap penyewa sampai masa sewa habis, namun dalam masa sewa-menyewa berlangsung pemilik lahan memanfaatkan lahan parkir tersebut sehingga secara tidak langsung pemilik lahan mengambil yang bukan menjadi haknya, hal ini dilarang oleh Islam. Sehingga akad yang terjadi antara penyewa dengan pemilik lahan memiliki unsur ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh penyewa dari pada kemaslahatannya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlph. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

**Nama : Reza Ayu Aprilia**

**NPM : 1621030197**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PARKIR YANG TELAH DISEWAKAN (Studi di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**NIP.196010211991031003**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag**

**NIP.196612271995031001**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlpn. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PARKIR YANG TELAH DISWAKAN (STUDI DI PASAR SIDOMULYO KECAMATAN SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN)”** disusun oleh **Reza Ayu Aprilia**, Npm **1621030197**, program studi **Muamalah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari: **Rabu, 10 Februari 2021**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Sekertaris : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H**

**Penguji I : Drs. H. Irwantoni. M.Hum.**

**Penguji II : Sucipto. S.Ag., M.Ag.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Kholil Chairuddin, M.H.**

**2102119930310002**



## MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

(Q.S An-Nahl [16]: 91)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Maryatno dan Ibunda Aisyah tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas tangan yang tak pernah berhenti menadah untuk mendo'akanku, atas harapan dan kepercayaan yang tak pernah hilang untukku, atas senyuman yang menjadi penyemangatku, atas kasih sayang, dan pengorbananmu untukku, anakmu. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki keberkahan umum kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'alam.
2. Keluarga tercinta (Rita Ernawati, Eko Wintarto, Riana Ayu, Nita Ayu, Azriel, Arsyla, Adelia, dan Talitha) yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas dengan keridhoan yang liar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tempat penulis menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Reza Ayu Apilia, dilahirkan di Gunung Putri pada tanggal 14 April 1998, anak pertama dari pasangan (Alm Maryatno) dan (Aisyah), pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri(SDN) I Sedayu dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Sukaraja selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) II Pringsewu selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Iintan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016.



Bandar Lampung, 29 November 2020

Penulis

**Reza Ayu Aprilia**  
NPM.1621030197



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya atas penyelesaian penulisan penelitian dalam skripsi ini.

Shalawat serta salam diperuntukan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya taat pada ajaran Islam yang sempurna.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta khusus dan hormat penulis mengucapkan terimakasih untuk dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. KH Khairuddin Tahmid, MH, Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni. M.Hum. Selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan staff serta karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang baik.

6. Keluarga besarku yang tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian ini.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Annisa Suwandy, Aldo Dwi Saputra, Dinda Bestari, Yurika, Rizki Yulian, Rizki Segi Indrawan, yang senantiasa ikut berjasa dalam menggapai segala cita-citaku di Kampus UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk Dio Sa Fallas, terimakasih untuk waktu dan semangat yang telah diberikan untukku.
9. Rekan-rekan ku khusus nya Mahasiswa dan Mahasiswi Muamalah kelas D seperjuangan angkatan 2016 di Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pendidik atau masyarakat luas, kapan dan dimana saja serta dapat diamalkan oleh siapa saja, kritik serta saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 November 2020

Penulis

**Reza Ayu Aprilia**  
NPM.1621030197



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	15
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	15
2. Tujuan Dan Manfaat Hukum Ekonomi Syariah .....	16
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	19
B. Hukum Islam Tentang Akad .....	22
1. Pengertian Akad .....	22
2. Dasar Hukum Akad .....	27
3. Rukun dan Syarat Akad .....	29
4. Macam-macam Akad .....	34
5. Berakhirnya Akad .....	35
C. Hukum Islam Tentang <i>Al-Ijarah</i> .....	36
1. Pengertian <i>Al-Ijarah</i> .....	36
2. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	38
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i> .....	44
4. Macam-macam <i>Al-Ijarah</i> .....	47
5. Batal dan Berakhirnya <i>Al-Ijarah</i> .....	48
D. Tinjauan Pustaka .....	51
 <b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Sidomulyo Lampung Selatan .	55

B. Praktik Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan.....	66
--	----

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan.....	72

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

3.1 Data Sarana dan Prasarana Pasar Sidomulyo .....	58
3.2 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha dan Jenis Dagangan .....	59
3.3 Lahan Parkir di Pasar Sidomulyo.....	60
3.4 Muatan Kendaraan (Motor-Mobil) .....	60
3.5 Data Nama Pekon dan Kepala Pekon Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.....	62
3.6 Data Penduduk Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan .....	64
3.7 Data Mata Pencaharian Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.....	66
3.8 Data Sektor Pendidikan Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan .....	66



## DAFTAR GAMBAR

1. Badan Stuktur Organisasi UPT Pasar Siomulyo Kec. Sidomulyo Kab.  
Lampung Seatan.....50





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan (Studi Pada Pasar Sidomulyo Lampung Selatan)”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah” hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki , mempelajari, dsb).<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasby Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka , 1998), h. 1470.

<sup>2</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

### 3. Pemanfaatan

Pemanfaatan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, atau proses memanfaatkan.<sup>3</sup>

### 4. Lahan

Lahan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tanah, tempat, atau lokasi yang akan digunakan untuk hal-hal tertentu.<sup>4</sup>

### 5. Sewa menyewa

Sewa menyewa adalah “memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.”<sup>5</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih dan menentukan judul skripsi ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Secara Objektif

Sejalan dengan perkembangnya zaman yang demikian pesat, maka persoalan muamalah pun berkembang, sehingga perlu memahami dengan

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.928

<sup>4</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 120

<sup>5</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2016), h. 133.

benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya tentang pemanfaatan oleh pemilik lahan yang telah disewakan.

## 2. Secara Subjektif

Kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah Disewakan” (Studi Pada Pasar Sidomulyo Lampung Selatan)**. Maksud dari judul penelitian diatas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas didalam penelitian ini yang berkaitan dengan pratik pemanfaatan lahan parkir yang sudah disewakan yang terjadi di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum



dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu, ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau kegiatan.<sup>6</sup> Para subjek perjanjian sewa-menyewa yaitu pemilik barang atau jasa dan penyewa.

Tujuan Fiqih Muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>7</sup> Al-quran dan sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya, diserahkan kepada ahlinya. Akibat dalam aplikasinya, pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan *maslahat* bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi.<sup>8</sup>

Sewa-menyewa lahan beserta ruko yang terjadi di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan telah dipraktikkan oleh salah satu warga yang bertempat tinggal di Desa Sidomulyo tersebut yang telah menyewakan lahan dan ruko kepada salah satu warga Sidomulyo. Lahan dan ruko tersebut terletak di sebelah kiri pasar, dan lahan yang sudah disewa dimanfaatkan sebagai lahan parkir, lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir tersebut terletak di samping ruko persis, dan rukonya dimanfaatkan sebagai warung nasi uduk oleh yang menyewa lahan tersebut. Di dalam akad pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas fisik ruko dan pemilik lahan memperbolehkan halaman depan ruko dijadikan sebagai lahan parkir. Warga

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 1993), h. 9.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12.

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 151.

yang parkir di lahan itupun lumayan ramai namun setiap waktu solat penyewa lahan tersebut selalu pergi ke Masjid untuk menunaikan ibadah solat berjamaah. Namaun diselah itu pemilik lahan memanfaatkan waktu tersebut untuk mengambil alih parkir dan uang parkir tanpa sepengetahuan penyewa lahan, ketikapenyewa sedang melakukan ibadah dan uang hasil parkir tidak diberikan kepada penyewa.

Sewa menyewa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa warga yang ada di Sidomulyo Lampung Selatan dalam bentuk bidang Muamalah. Sewa-menyewa lahan yang berkembang di masyarakat, karena faktor untuk menyewakan dan penyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam membantu perekonomian. Sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Sidomulyo ini, masyarakatnya masih awam terhadap hukum ekonomi syari'ah atau hukum Islam, sehingga perlu memahami lagi syari'at Islam, terutama dari sisi akadnya agar tidak terjerumus kedalam transaksi bermuamalah yang dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa-menyewa lahan secara benar, maka setiap pelaksanaan sewa-menyewa. Masyarakat bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku, sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa-menyewa yang ada di pasar Sidomulyo.

Praktek kegiatan sewa-menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, akan tetapi di dalam prakteknya hendaknya perlu diperhatikan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Isi perjanjian hendaknya disepakati kedua belah pihak. Jika nantinya perjanjian ini dilanggar ataupun diingkari, ini

akan menjadi permasalahan yang perlu di selesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada.

Masalah lainnya yaitu dalam penyelesaian pelanggaran akad dimana penyewa atau pemilik sewaan melanggar isi perjanjian yang tentunya mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, misalnya penyewa harus mengalami kerugian karena uang yang seharusnya menjadi hak milik penyewa di ambil oleh yang menyewakan lahannya, di sini apakah pemilik sewa akan mengembalikan uang sewa pada penyewa atau tidak.

Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah sewa-menyewa dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Jadi hendaklah dalam suatu hubungan dilandasi dengan prinsip di atas.

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Yang Telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup penyewaan lahan parkir di Pasar Sidomulyo Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan

#### **G. Signifikansi / Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil Peneliti diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan oleh pemilik lahan parkir telah disewakan dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan *Muamalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak-pihak yang terlihat dalam transaksi sewa-menyewa lahan parkir, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan praktik sewa-menyewa pemanfaatan lahan parkir dengan perspektif Islam, sehingga memberikan rasa nyaman kepada penyewa lahan parkir.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

c. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai Sewa-menyewa lahan parkir.

## H. Metode Penelitian

Adapun agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.<sup>10</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature pusataka dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 100.

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 10.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fatual dan cermat.

Adapun istilah nya sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik dan menilai penelitian tersebut dalam tinjauan Hukum Islam. Deskriptif adalah menggambarkan praktek pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa lahan parkir. Penelitian ini bersifat menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya menggambarkan jalan nya peristiwa. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-menimbang permasalahan yang di hadapinya, mana yang relavan mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya.

## 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Hukum dari pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-



lain).<sup>12</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>13</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah : Al-Qur'an, Hadist, Buku, Kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literature-literatur lainnya yang mendukung.

## 4. Populasi dan Sample. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Atau populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga.<sup>14</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang parkir di lahan tersebut, Jumlah populasi yang diambil 115 orang, diantaranya 1 orang pemilik lahan, 2 orang penyewa lahan dan 112 orang pemilik kendaraan yang diambil pada Hari Senin-Rabu, Tanggal 1 September 2020 – 3 September 2020.

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 73.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 138.

## b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-5%.<sup>16</sup> Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 12% dari jumlah populasi yaitu 1 orang pemilik lahan, 2 orang penyewa lahan dan 10 orang pemilik kendaraan, dengan total sampel yaitu 13 orang.

## 5. Teknik Pengambilan Data

### a. Teknik Observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran penelitian.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk meneliti bermacam-macam gejala. Banyak aspek-aspek tingkah laku manusia

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 112

yang hanya dapat diamati melalui observasi langsung. Bagi seseorang yang terlalu sibuk, lebih tidak berkeberatan untuk diamat-amati dari pada mengisi jawaban-jawaban dalam kuesioner.

Observasi di sini penyusun secara langsung mengamati objek penelitian, yaitu pemilik dan penyewa, memperhatikan segala aspek yang mereka lakukan didalam praktek sewa-menyewa tersebut.

#### b. Wawancara

Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan cara interview-interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*, *contralled interview* atau *structured interview*. Yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

Penyusun akan mewawancarai responden untuk mendapat informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti, disamping itu nantinya penyusun akan mewawancarai penyewa dan masyarakat yang parkir dilahan tersebut guna melengkapi data yang diperlukan.

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 84.



### c. Dokumentasi

Pengambilan data dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil, Hukum-Hukum dan lainnya, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 6. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

### a. Pemeriksaan (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

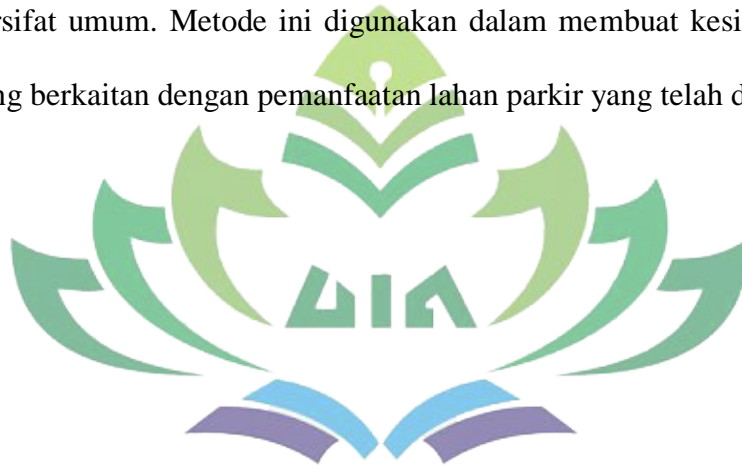
sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui cara berfikir Deduktif dan Induktif

Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Sedangkan metode Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan parkir yang telah disewakan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>18</sup> Hukum ekonomi merupakan segala keseluruhan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>19</sup> Ekonomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi.<sup>20</sup>

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6.

<sup>20</sup> Firdauska Darya Satria, *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, NonBank)*, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diunduh pada 07 Maret 2020

manusia.<sup>21</sup> Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>22</sup> Berdasarkan uraian di atas hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.

## 2. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Syariah

### a. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar maruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>23</sup> Adapun sudut pandang tersebut sebagai berikut:

#### 1) Ekonomi *Illahiyah* (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.4.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 13.



## 2) Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

## 3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikat predikat “*Khalifah*” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dapat melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “*Khalifah*” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.<sup>25</sup>

## 4) Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.<sup>26</sup>

Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 13

bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.<sup>27</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah memberi suatu aturan dan pemahaman bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

#### **b. Manfaat Ekonomi Syariah**

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:<sup>28</sup>

- (a) Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial.
- (b) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.

---

<sup>27</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.3.

<sup>28</sup>Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com) diunduh pada 07 Maret 2020.

- (c) Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.<sup>29</sup>
- (d) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar maruf nahi munkar*.
- (e) Tahan krisis, Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Adapun dalam hal ekonomi, Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru. Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.<sup>31</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com) diunduh pada 07 Maret 2020

<sup>30</sup> *Ibid...*

<sup>31</sup> Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com) diunduh pada 07 Maret 2020.

a. Prinsip *Tauhidi* (*Unity*)

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Prinsip Halal

Nadratuzzaman berpendapat sebagaimana yang diikuti oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memprolehnya, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya.

c. Prinsip *Maslahah*

*Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.



d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.<sup>32</sup>

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.<sup>33</sup>

f. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Pengimplementasian zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.<sup>34</sup>

h. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab (*adl* ) yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

---

<sup>32</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) h. 22.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 23.

Sebagaimana yang ada dalam prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip kebermanfaatan
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak melarang

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam bermuamalah terutama dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

## **B. Hukum Islam Tentang Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Secara *etimologi* (bahasa), akad yaitu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang *disyari'atkan* yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.<sup>36</sup> Dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata (*al-'Aqad*) artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara) baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi.<sup>37</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab kata akad berasal dari kata *al-'Aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan, bentuk *masdar* dari *'Aqdu* dan

<sup>35</sup>Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

<sup>36</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46.

<sup>37</sup> Muhamad Firdaus, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2006), h. 12.

jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.<sup>38</sup>

Sedangkan definisi akad menurut *terminologi* (istilah) adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>39</sup>

Penjelasan kata “*sesuai dengan syari'at*” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya kesepakatan kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain dan merampok kekayaan orang lain. Adapun penjelasan dari kata “*berpengaruh pada objek perikatan*” maksudnya yaitu terjadinya perpindahan pemikiran dari suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).<sup>40</sup>

Kata akad juga berarti keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang di *syari'atkan*. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.<sup>41</sup> Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan

---

<sup>38</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “ Akad Jual Beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol, XII No 2, (26 September 2020), 786.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.32.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 51.

<sup>41</sup> Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

akad (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan.<sup>42</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikan kata akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. *Pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syari'at. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>43</sup>

Pengertian akad menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Nazih Hammad mengartikannya kepada dua makna *pertama*, yaitu menghubungkan dua ucapan seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara'. *Kedua* yaitu tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seseorang atau lebih.<sup>44</sup>
- 2) Menurut Abu Zahrah mendefinisikan akad yaitu menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat kepada kedua belah pihak.<sup>45</sup>
- 3) Menurut al-Maushu'ah dan al-Fiqhiyyah mengartikan akad kepada dua makna yaitu makna umum dan khusus. *Pertama*, makna umum yaitu setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad manusia tentang suatu urusan yang akan dilakukannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan. Berdasarkan arti umum akad

<sup>42</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.35.

<sup>43</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), h. 247.

<sup>44</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 36.

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 37.

sebagaimana disebutkan diatas, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad mu'awadhah lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terkait dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya. *Kedua*, makna khusus dapat dipahami bahwa akad adalah setiap tindakan yang timbul dari kehendak kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab kabul. Dengan demikian kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.<sup>46</sup>

4) Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* yang dikutip oleh Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>47</sup>

5) Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan

---

<sup>46</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 38-39.

<sup>47</sup>Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol, XII No 2, (26 September 2020), h.785-806.



dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul.<sup>48</sup>

- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>49</sup>
- 7) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.<sup>50</sup>
- 8) Menurut Al-Raghib akad yaitu, akad antara Allah dan hamba-nya, akad antara hamba dan dirinya, dan akad antara seseorang hamba dengan hamba yang lain.<sup>51</sup>
- 9) Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.<sup>52</sup>

Berdasarkan definisi-definisi, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan kabul yang dilakukan antara dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau

---

<sup>48</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkul Al-Fiqhi Al-Am Al-Islmi Fi Tsaubihi Al-jadid*, Jilid I, (Beirut.Dar al- Fikr, 1968), h.330.

<sup>49</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 51.

<sup>50</sup>Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food”, *Amwaluna*, Vol, 2 No. 1 ,( Januari 2018), h.146.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, h.52.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 54.

perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam menjadi halal hukumnya.

## 2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad dapat ditemui di dalam firman Allah Swt :

### 1) Surat Al-Maidah Ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>53</sup>

### 2) Surat Ali-Imran Ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.<sup>54</sup>

### 3) Surat Al-Baqarah Ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Quran, 2007), h.106.

<sup>54</sup>*Ibid.* h.59.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>55</sup>

#### 4) Surat An-Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>56</sup>

Dari keempat ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antaradhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>*Ibid.*, h.5.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Quran, 2007), h.141.

<sup>57</sup>Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol, XII No 2, (26 September 2020), h. 786.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Rukun berasal dari kata mufrad dari kata jama *arkaa*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan).<sup>58</sup> Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*'aqid*), objek yang dijadikan akad (*ma'qud alaih*), serta ungkapan ijab dan kabul (*shighat*).<sup>59</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain shighat dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan. Artinya shighat tidak sah jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*'aqid*) dan objek akad (*maqud 'alaih*).<sup>60</sup> Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap

<sup>58</sup>M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.30.

<sup>59</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.45.

<sup>60</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.13.

dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Rukun akad terbagi menjadi beberapa rukun yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dan gadai.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al-'Aqd* ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad dan diucapkan setelah adanya ijab. Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'Aqd* (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat al-Aqd* (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya.

Maksudnya, kata-kata di dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

- 2) Harus sesuai dan tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpang siuran dalam *Sighat al-Aqd* (ijab dan qabul) akan menimbulkan



permasalahan yang dilarang oleh agama karena bertentangan diantara sesama manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.<sup>61</sup>

Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah), diantaranya yaitu :

- a. *Gila*, yaitu bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka tidak sah nya akad tersebut.
- b. *Rusak akad*, yaitu dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan dengan pengertian gila.
- c. *Mabuk*, yaitu seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol yang memabukan.
- d. *Tidur*, yaitu dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut.

---

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47-48.

- e. *Pingsan*, yaitu sama dengan orang yang tidur, seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.
- f. *Pemboros*, yaitu seseorang yang masuk kriteria pemboros tidak dapat melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalahgunaan akad.
- g. *Dungu*, yaitu seseorang yang akadnya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dungu maka akadnya tidak sah, karena akad merugikan dirinya maupun merugikan para pihak yang berakad.
- h. *Hutang*, yaitu orang yang terlalu banyak hutang akan membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkannya penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak hutang.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, ijab dan kabul.

## 2) Syarat Akad

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal

---

<sup>62</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas –Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Cet Ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.32.

penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut.

Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu, *pertama* syarat-syarat yang *bersifat umum*, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Setiap pembentukan akad ada syarat-syarat umum yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan. *Kedua*, syarat-syarat yang *bersifat khusus*, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi di dalam pernikahan.<sup>63</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- (a) *Akid* (orang yang berakad), disyaratkan memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad.
- (b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>64</sup>
- (c) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- (d) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

<sup>63</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.49.

<sup>64</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 47-

- (e) Akad itu diperbolehkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- (f) Akad bukan jenis akad yang dilarang
- (g) Akad dapat memberi faedah
- (h) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul. Maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.<sup>65</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:<sup>66</sup>

1. *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 54-55.

<sup>66</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2003), h. 110.

melaksanakan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.<sup>67</sup>

2. *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam yaitu:

- a) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- b) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>68</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Ulama fiqh menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - a) Akad itu *fasid* (rusak)
  - b) Berlakunya *khiyar* syarat 'aib
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad.

<sup>67</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

<sup>68</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 33

<sup>69</sup>*Ibid*, h. 34



- d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- e) Wafat salah satu pihak yang berakad .

## C. Hukum Islam Tentang *Ijarah*

### 1. Pengertian *Al-Ijarah*

Sewa-menyewa merupakan suatu istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam urusan bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>70</sup> *Ijarah* menurut bahasa artinya adalah upah ataupun sewa-menyewa, sedangkan menurut syara adalah sewa menyewa yang di dalamnya melakukan akad dan mengambil manfaat dari suatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan sesuai dengan syarat.<sup>71</sup>

Menurut bahasa Arab *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-iwadh* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>72</sup>

Adapun dalam fikih Islam, *Ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut fatwa DSN *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

<sup>70</sup> Ajib Ghufroon, *Fiqh Muamalah II kontemporer Indonesia*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 124.

<sup>71</sup> Helmi Karin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>73</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa untuk imbalan tertentu. Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>74</sup>

Menurut pengertian syara' *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (mu'ajir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak mua'jir oleh seorang musta'jir. Dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>75</sup> Berikut beberapa penjelasan dari hadist terkait tentang *ijarah*/sewa-menyewa:

Menurut para ulama *ijarah* diartikan sebagai:

<sup>73</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.122.

<sup>74</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.160.

<sup>75</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung : Al-ma'arif, 1997), h. 11.

- 1) Ulama Hanafi mengatakan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian.<sup>76</sup>
- 2) Ulama syafi'i mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).
- 3) Ulama Hambali *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.

Beberapa definisi dari para ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (mu'ajir) oleh seorang penyewa (musta'jir).

## 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya. Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa)

---

<sup>76</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 390.

atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diberikan terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

#### 1) Al-Qur'an

Surat Al-Qashsh Ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْرِجُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>77</sup>

Surah Al-Qashsh Ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حَبْجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Quran, 2007), h.

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 190

Dari beberapa al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

## 2) Hadis

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَّجَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقِّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari bekharaj. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).<sup>79</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عِرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

<sup>79</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), juz 2, hal. 165



“Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (Hadis riwayat Ibnu Majah).<sup>80</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرُورَةَ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِيِّ هَادِيًا حَرِيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari Ma'marin dari Zuhri dari „Urwah bin Zubar dari „Aisyah, ra, berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki ini berasal dari bani ad-dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua tsaur selama tiga malam. Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya” (HR. Bukhari Muslim)<sup>81</sup>

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَجَالٍ مِّنَّا فَضُولٌ أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا: نَوَّا جَرْهًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا لِيَمْنُهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضِهِ (رواه البخاري و مسلم)

Jabir bin Abdullah berkata, “ada beberapa orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata,kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga (hasil), seperempat atau setengah.” Maka

<sup>80</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: MutiaraIlmu, 1995), hlm 389s

<sup>81</sup>Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hal. 68.

Nabi bersabda, barang siapa memiliki lahan hendaklah ia tanami, atau ia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak mau, hendaklah ia biarkan tanahnya (tidak memberikan atau menyewakan).“(HR. Bukhari Muslim).<sup>82</sup>

### 3) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>83</sup> Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah dapat meringankan beban orang lain dan dapat mendatangkan manfaat. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain (rumah kost) dengan waktu tertentu dengan membayar uang sewa yang telah disepakati. Dalam *berijarah* diperbolehkan karena mengandung unsur manfaat, kejelasan dalam objek sewa serta tujuan dan maksud yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti (upah) yang jelas.

Ajaran Islam pada prinsipnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia, yang telah menjadi fitrohnya saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>84</sup> Definisi Ijarah menurut pandangan para ulama, diantaranya adalah :

<sup>82</sup>Muhammad Fuad Asbdul Baqi, *Al-lu"lu wal Marjan (Mutiara Hadist sahih Bukhari dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Quran, 2015), hal. 741-742.

<sup>83</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.125.

<sup>84</sup>Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al- Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 90.

- a) Menurut Ulama Hanafiah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat yang dimaksud dan tertentu dari barang yang disewa dengan imbalan.<sup>85</sup>
- b) Menurut Malikiyah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>86</sup>
- c) Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang dimaksud dan tertentu serta yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>87</sup>
- d) Menurut Hambaliah, *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafadz *Ijarah* dan kara' dan semacamnya.<sup>88</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah SAW dan Ijma' di atas, jelas dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya mubah (boleh) dengan dasar hukum, *ijarah* sangat kuat karena dasar hukum tersebut merupakan sumber utama dalam hukum islam, *Ijarah* adalah akad atas manfaat suatu barang.<sup>89</sup> Jadi dalam hal ini benda yang menjadi objek sewa tidak boleh berkurang nilai kadar selama barang tersebut masih dalam waktu sewa, serta pihak penyewa wajib memberikan uang sewa dari objek sewa tersebut.

<sup>85</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqih" ala Al- Madzhab Al- Arba"ah* (Kairo: Dar Al-Hadist, 2004), h. 77.

<sup>86</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, cet. I, Dalam Ahmad Wardi Muslih, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316.

<sup>87</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hili Ghayah Al-Ikhtisar*, (Surabaya: Al- Ilmi, 2014), h. 209.

<sup>88</sup> Syamsudin Bin Qudamah Al- Maqdisi, *Asy-Syarah Al-Kabir*, (Surabaya: Al- Fikir, 2013), h. 134.

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

### 3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah

#### a. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sebagai sebuah transaksi umum sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lain. Menurut Jumhur Ulama rukun sewa menyewa (*Ijarah*) adalah sebagai berikut:

##### a) Orang yang berakad (*Aqid*)

“Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*)”.<sup>90</sup>

##### b) Adanya akad (*Ijab* dan *Qabul*)

*Ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya”.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.

<sup>91</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rjawali Ppers, 2010), h. 124.

c) Sewa atau imbalan (*Ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di mana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.<sup>92</sup>

d) Manfaat atau obyek (*Ma'qud Alaih*)

*Ma'qud alaih* yaitu barang yang dijadikan obyek sewa menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah:<sup>93</sup>

- (1) Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan.
- (2) Obyek *ijarah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan.
- (3) Obyek harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan.
- (4) Dapat dimanfaatkan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.

b. Syarat-syarat sewa menyewa (*Ijarah*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat

<sup>92</sup> *Ibid.* h. 125.

<sup>93</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad Adapun macam-macam syarat yang dimaksud sebagai berikut:

a) Pelaku sewa menyewa harus berakal

Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). “Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*.<sup>94</sup> Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>95</sup>

b) Ridho kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak, keduanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>96</sup>

c) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 320.

<sup>95</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 31



d) Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang *gharar*, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.<sup>98</sup>

e) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.<sup>99</sup>

f) Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.<sup>100</sup>

#### 4. Macam-macam Al-Ijarah

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* menurut Ulama Fiqh terbagi menjadi dua macam :

- 1) ***Ijarah 'ain*** atau sewa menyewa yang bersifat manfaat, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang

<sup>98</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* ((Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 321.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013), h. 19-20.

diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>101</sup>

2) ***Ijarah immah*** atau sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan<sup>102</sup> dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan.<sup>103</sup> Akad ini dalam Madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*), yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.<sup>104</sup>

## 5. Pembatalan Atau Berakhirnya Al-Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena

<sup>101</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 662.

<sup>102</sup> Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 83.

<sup>103</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 662.

<sup>104</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), h. 57.

*ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan *fasakh*”.<sup>105</sup> *Ijarah* akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.<sup>106</sup>

2) Rusaknya barang yang disewa

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa,<sup>107</sup> dan demikian juga jika hewan yang menjadi obyek sewa mati maka akan berakhir masa sewanya.<sup>108</sup>

3) Salah satu pihak meninggal dunia, Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana telah dibahas dalam sifat akad di atas, hal tersebut dapat

<sup>105</sup> Sohari Sahari, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 173.

<sup>106</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 57.

<sup>107</sup> *Ibid.* h. 58.

<sup>108</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 155.

membatalkan akad. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak menyebabkan batalnya akad

#### 4) Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.<sup>109</sup> Namun jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*, seperti masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai ditanam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>110</sup> Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>111</sup>

#### 5) Adanya *uzur*

“Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya

<sup>109</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 155

<sup>110</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013), h. 285.

<sup>111</sup> D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 663.

musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa”.<sup>112</sup>

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.<sup>113</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Lahan Parkir yang Telah Disewakan (Studi Kasus di Pasar Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan)” penulis menemukan beberapa jurnal atau penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi Lolyta (2014) dengan judul “Sewa-Menyewa tanah menurut Ibnu Hazm dalam Prespektif Fiqh Muamalah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dalil yang dipakai Ibnu hzm tentang sewa-menyewa tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ibnu hazm penyewaan tanah tidak boleh dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Apabila

---

<sup>112</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa* (Bandar Lampung : Permatanet. 2016.), h. 185.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 186

penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (*faskh* atau rusak akadnya). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali. Kekuatan argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm yang melarang penyewaan tanah secara mutlak berdasarkan hadits yang menyatakan secara tegas dan jelas (*zahir*), dan urgensi pendapat Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah selain berdasarkan *zahir nash* juga menurut akal adalah perlu adanya keadilan antara pemilik lahan dan petani penggarap serta menghindari unsur *gharar* yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu si petani penggarap.<sup>114</sup>

2. Skripsi Husain Insawan (2017) dengan judul “Al-Ijarah dalam Prespektif Hadist: Kajian Hadist dengan Metode *Maudhu’iy*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep *al-ijarah* dalam Prespektif Hadist Nabi dan untuk mengetahui kualitas suatu hadist yang membahas tentang *al-ijarah*. Hasil penelitian ini menunjukkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbul (164-241 H) tersebut tergolong hadits ahad masyhur dan berkualitas sahih berdasarkan penilaian para ahli hadist yang menilai sanadnya bersambung hingga sampai kepada Rasulullah saw. Serta para perawi hadist tersebut tergolong adil, *sabt (tsiqah)*, akhlaknya terpuji, *shaduq*, *ashah asanid*, dan *a’lam al-naas*. Dengan demikian, hadist yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal dapat dijadikan sebagai payung hukum pada kegiatan *al-Ijarah* dengan melihat konteknya dalam kehidupan

---

<sup>114</sup>Lolyta, “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm dalam Prespektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vo1.XIV, No.1, 2014, h.125-136.



kekinian. Bahwa *al-Ijarah* merupakan bentuk muamalah antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau upah mengupah baik menyangkut jasa maupun produksi dan kegiatan *al-Ijarah* dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan syara'.<sup>115</sup>

3. Skripsi Ambariyani dan Wiwik Damayanti (2017) dengan judul “Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam pandangan Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kot Metro )”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses upah jasa pengairan sawah dikota metro dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari’ah tentang akad jasa di Kota Metro Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad ijarah dikota metro merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan. Ditinjau dari teori ijarah tentang pelaksanaan akad jasa yang terjadi di Kota Metro dilakukan dengan menyewa tenaga bekerja untuk mengairi persawahan selama masa tanam sampai masa panen. Adanya pelanggaran akad yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad menyebabkan rukun ijarah menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang *fasid*. Akad jasa ini belum memenuhi rukun dan syarat ijarah karena adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang merugikan pihak lain, yaitu adanya upah yang harus menjadi hak dari pengelola irigasi tidak di berikan meskipun dari pihak petani telah panen. Adanya permasalahan nya yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan penanggulangi upah,

---

<sup>115</sup> Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadist: Kajian dengan Metode Maudhu’iy, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.II, No. 1, 2017, h .137-154.

menyebabkan ketidaksempurnaan akad ijarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>116</sup>



---

<sup>116</sup>Ambariyani dan Wiwik Damayanti,"Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kota Metro )",*Jurnal Mahkamah*,Vol.II,No,1,2017, h.103-134.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bogor: Syamil Quran, 2007

### Hadist

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. 1995. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiarailmu

Al-Jaziry, Abdur Rahman. *Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah. al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra* Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Bukhari. 1992. *Sahih Bukhari*. Juz 3. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah.

Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra.

### Buku

Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamala*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo..

Ash-Shiddieqy, Hasby. 1995. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

D. Sirrojuddin Ar. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firdaus, Muhamad. 2006. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*. Jakarta: Renaisan.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2016. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim. 1975. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1975.
- Idris Ahmad, Al-Ustadz. 1986. *Fiqh Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Ja'far, Kumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Permatanet.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz. 2010. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid dan Akhmadi, Abu. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Abdul Djamali. 1992. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*. (Bandung: Mandar Maju.
- Radial. 2014. *Pradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq. Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sahari, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayant, dan Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, 2008. Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Syariffuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. 1998. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Yu'kub. Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro.

### **Jurnal**

- Ambariyani dan Wiwik Damayanti. "Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kota Metro)". *Jurnal Mahkamah*. Vol.II.No.1.2017
- Husain Insawan. "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadist: Kajian dengan Metode Maudhu'iy". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.II. No. 1. 2017.
- Lolyta. "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm dalam Prespektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Hukum Islam*. Vol.XIV. No.1. 2014.
- Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani. " *Akad Jual Beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII No 2. ( Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lmpung. 2015). h. 786. (on-line). tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (26 November 2019). dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **Wawancara**

- Bapak Hartono. Kepala Desa. **Wawancara**. di Pasar Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. 1 September 2020
- Bapak Hartono. Kepala Desa. **Wawancara**. Pasar Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. 1 September 2020
- Bapak Bambang Widodo. Tata Usaha. **Wawancara**. di Pasar Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. 1 September 2020
- Hariyanto. Wawancara dengan pemilik ruko. Sidomulyo 31 Agustus 2020

Aldo . Masyarakat yang parkir di lahan Parkir. Sidomulyo. 3 September 2020

Junaidi.Wawancara Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasar Sidomulyo. 2 September 2020

NaryaWawancara Pemilik Kendaraan Bermobil . Pasar Sidomulyo. 2 September 2020

Suroto .Wawancara Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasar Sidomulyo. 2 September 2020

Angga . Wawancara Pemilik Kendaraan Bermobil. Pasar Sidomulyo. 2 September 2020

Siswoko. Wawancara Pemilik Kendaraan Bermobil. Pasar Sidomulyo. 3 September 2020

Rita Ernawati. Wawancara Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasar Sidomulyo. 3 September 2020

Paniem. Wawancara Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasar Sidomulyo. 3 September 2020

Lita. Wawancara Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasar Sidomulyo. 3 September 2020

